

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Maruti Nurhayati (2007) yang berjudul faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Barat menggunakan variabel pendapatan, pendidikan, jumlah pengangguran dan tingkat ketergantungan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda di peroleh hasil koefisien regresi untuk pendapatan bernilai negative yaitu sebesar 0,002 yang berarti setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 persen akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,002 persen. Tingkat pendidikan memiliki koefisien regresi bernilai negatif yaitu 0,38 yang berarti jika tingkat pendidikan meningkat satu persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,38 persen. Nilai koefisien regresi untuk tingkat pengangguran bernilai positif yaitu sebesar 0,17 yang berarti jika tingkat pengangguran meningkat satu persen maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,17 persen. Koefisien regresi untuk variabel tingkat ketergantungan bernilai positif sebesar 0,23. Hal tersebut berarti jika tingkat ketergantungan meningkat sebesar satu persen maka akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,23 persen.

Jonaidi (2012) Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan (*Simultaneous Equations Models*) hasil penelitian ini

adalah terdapat hubungan dua arah yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Sebaliknya kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Barika (2013) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi se Sumatra menggunakan metode analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) dan menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Pertumbuhan ekonomi (x1) dan inflasi (x4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi se Sumatra. Pengeluaran pemerintah (x2) dan pengangguran (x3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi se Sumatra.

Penelitian ini mengadopsi dari penelitian Nurhayati, Barika dan Jonaidi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak sepenuhnya sama dengan variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Variabel yang sama adalah variabel pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda

B. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang mampu menghambat jalannya pembangunan. Banyak program yang diberikan pemerintah dalam upaya penanggulangannya. Banyak sekali pengertian kemiskinan yang ada sesuai dengan keberadaannya / pembagiannya (Yulia, 2005).

1. Pengertian kemiskinan

Kemiskinan menurut kamus besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990) dalam Yulia (2005) adalah berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Sedangkan kemiskinan diartikan selalu berkaitan dengan orang atau kelompok yang serba kekurangan, menyangkut kebutuhan pokok minimum atau mendasar (makanan dan tempat tinggal) yang tidak memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak.

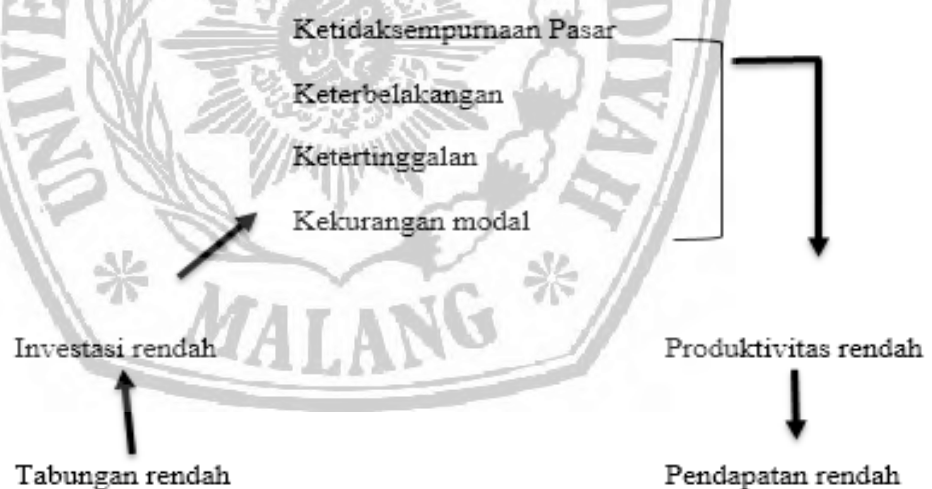
Yulia (2005) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial itu meliputi:

- a. Modal yang produktif atas aset, misalnya tanah, perumahan, peralatan dan kesehatan
- b. Sumber keuangan, seperti pendapatan dan kredit yang memadai
- c. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingannya bersama, seperti partai politik atau koperasi
- d. Network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang – barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai
- e. Informasi – informasi yang bersama untuk kehidupan

Sharp dalam Kuncoro (1997) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari segi ekonomi. Pertama, secara mikro, ketidak samaan dalam kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya terbatas dan kualitas rendah.

Kedua, perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya yang rendah berarti produktifitas rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, perbedaan akses modal.

Ketiga penyebab ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*) yang dikemukakan oleh Nurke dalam Kuncoro (1997). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya (lihat gambar 2.1)



Gambar 2.1
Vicious Circle of Poverty
 (sumber Kuncoro, 1997)

2. Karakteristik dan Ciri – ciri Kemiskinan

Kemiskinan juga memiliki beberapa karakteristik dan ciri – ciri tersendiri. Beberapa yang telah diungkapkan oleh ahli diantaranya menurut Meier dan Baldwin (1965) dalam Yulia (2005), pada hakikatnya Negara – Negara miskin itu mempunyai enam ciri ekonomi yang pokok, yaitu :

- a. Menghasilkan bahan – bahan primer
- b. Menghadapi masalah tekanan penduduk
- c. Mempunyai sumber – sumber alam yang belum dikembangkan
- d. Mempunyai penduduk yang ekonominya terbelakang
- e. Kekurangan capital atau modal
- f. Terorientasi pada perdagangan luar negeri

Enam ciri tersebut adalah gambaran pokok dari Negara – Negara yang dianggap sebagai negara miskin.

Salim dan Nange (2001) dalam Yulia (2005) mengemukakan tentang ciri – ciri kelompok penduduk miskin sebagai berikut:

- a. Ciri pertama , ialah bahwa sebagian terbesar kelompok miskin ini terdapat didaerah pedesaan dan mereka ini umumnya buruh tani yang tidak memiliki tanah sendiri. Kapanpun ada yang memilik tanah maka luasnya tidaklah cukup membiayai ongkos hidup yang layak.
- b. Ciri kedua , ialah bahwa mereka itu pengangguran walaupun ada pekerjaan, maka sifatnya tidaklah teratur atau pekerjaan itu tidaklah memberikan pendapatan yang memadai bagi tingkat hidup yang wajar. Mereka ini terdapat diperkotaan maupun di pedesaan.

- c. Ciri ketiga , ialah bahwa mereka berusaha sendiri. Biasanya dengan menyewa perlatan dari orang lain. Sifat usaha mereka dan terbatas karena ketiadaan modal. Mereka banyak terdapat di perkotaan, tetapi dapat dijumpai di pedesaan.

Dari ciri – ciri kemiskinan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang atau keluarag atau kelompok penduduk yang mengalami kemiskinan mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Sebagian besar bermukim di daerah pedesaan
- b. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal maupun keterampilan
- c. Tidak mempunyai syarat yang bisa dipenuhi untuk memperoleh kredit bank, sehingga tidak mempunyai akses modal
- d. Anggota rumah tangganya banyak
- e. Tingkat pendidikan mereka rata – rata rendah
- f. Tempat tinggal, makanan, pakaian penyediaan air bersih dan penerangan listrik sangat memprihatinkan
- g. Sebagian besar mereka bekerja disektor pertanian dengan lahan terbatas dan pengolahannya masih terbatas
- h. Di daerah perkotaan biasanya mereka adalah pengangguran, bekerja sebagai pengerajin kecil, pegawai kecil sebagai buruh atau pegawai kecil swasta atau pemerintah dan sektor lainnya.

3. Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya, berikut adalah 2 macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif :

a. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara baik. Bila pendapatan tidak dapat mencapai minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 1997) dalam (Arsyad, 2004:238)

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu Negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup baik seseorang membutuhkan barang – barang dan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

Kebutuhan dasar dapat dibagi dalam 2 golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. *United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD)* menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas 3 kelompok yaitu: pertama, kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan; kedua, kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (*leisure*) dan rekreasi serta ketenangan hidup dan ketiga, kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.

Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan orang atau keluarga, tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia seperti yang dikemukakan oleh *International Labor Organization* (ILO, 1976) sebagai berikut: “kebutuhan dasar meliputi 2 unsur: pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga sebagai konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan, dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan. Kedua, kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan dan kultural.”

Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang mudah dimengerti. Tetapi penentuan garis kemiskinannya secara obyektif sulit dilaksanakan karena banyak sekali factor yang mempengaruhinya. Garis kemiskinan berbeda antar satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum.

b. Kemiskinan Relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, daripada lingkungan orang yang bersangkutan (Miller, 1971) dalam (Arsyad, 2004:239)

Berdasarkan konsep ini garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relative bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.

Oleh karena itu Kincaid (1975) melihat kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. Menurut kriteria Bank Dunia: pertama, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah memiliki kurang dari 12 persen dari pendapatan nasional, maka dapat disebut pembagian pendapatan sangat timpang; kedua, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan sedang; dan ketiga, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan rendah (Arsyad, 2004 : 240)

4. Faktor Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dengan mencermati kemiskinan yang merupakan salah satu faktor dari perangkat kemiskinan. Sumodiningrat (1997) membagi sebab – sebab kemiskinan menjadi dua yaitu :

Pertama, kemiskinan yang terjadi disebabkan faktor – faktor eksternal atau faktor yang berada diluar jangkauan individu. Faktor ini konkrit lebih bersifat hambatan , kelembagaan atau struktur yang memang bisa menghambat seseorang untuk meraih kesempatan – kesempatannya. Kedua, ialah kemiskinan yang yang disebabkan oleh factor –faktor internal yang berasal dari dalam diri atau lingkungannya. Kaum konservatif penganut pandangan ini melihat kemiskinan jenis ini terjadi akibat dari nilai – nilai dan kebudayaan yang dianut sekelompok masyarakat jadi tidak bermula dan struktur sosial tetapi berasal dari karakteristik khas orang – orang miskin itu sendiri”.

Sharp, et al. (1996) dalam Kuncoro (2004 ; 157) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterebelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh **Ragnar Nurske**, ekonom pembangunan ternama, ditahun 1953, yang mengatakan, “*a poor country is poor because it is poor*” (Negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Negara berkembang sampai saat ini masih saja memiliki ciri – ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan capital dapat terjadi, diikuti dengan rendah si produktivitas, turunnya pendapatan rill, rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

5. Dimensi Spasial Kemiskinan

Kuncoro (2004) mengungkapkan dimensi spasial dalam bidang ekonomi memiliki dua akses, yaitu :

a. Akses terhadap Lapangan Kerja

Tingkat kesempatan kerja merupakan rasio antara jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai rasio “kesempatan kerja” tersebut bukan dalam pengertian adanya “lowongan kerja”, akan tetapi

indikator ini dimaksudkan untuk merefleksikan tingkat penyerapan terhadap angkatan kerja.

b. Akses terhadap Faktor Produksi

Pertama, kemudahan masyarakat dalam mengakses modal usaha dapat dilihat dari ketersediaan lembaga – lembaga keuangan, seperti bank umum, BPR dan berbagai bentuk koperasi simpan pinjam pada tingkat kecamatan. Kemudahan dalam mengakses modal usaha ini dirumuskan berdasarkan persentase kecamatan tingkat kabupaten / kota yang tidak memiliki salah satu prasarana penyedia modal usaha. Semakin tinggi nilai presentase dari ketiadaan sarana permodalan tersebut, diasumsikan semakin rendah akses masyarakat terhadap sumber permodalan di wilayahnya.

Kedua, kemudahan masyarakat dalam mengakses pasar, sebagai pendekatan untuk melihat kemudahan masyarakat dalam mengakses pasar digunakan indikator ketersediaan pasar dalam unit administrative kecamatan. Pasar dimaksud adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang & jasa, baik berupa pasar dengan bangunan maupun tanpa bangunan, termasuk pasar tradisional. Sama halnya seperti akses terhadap sumber permodalan, akses terhadap pasar dihitung berdasarkan kecamatan yang tidak memiliki pasar dari total kecamatan di kabupaten/kota. Sama halnya seperti akses terhadap sumber permodalan, akses terhadap pasar dihitung berdasarkan presentase kecamatan yang tidak memiliki pasar dari total kecamatan di kabupaten/kota.

Ketiga, kepemilikan aset. Salah satu factor penting dalam melakukan aktivitas produksi/ekonomi adalah kepemilikan aset. Yang dimaksud aset disini adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung kegiatan usaha yang biasanya bukan berupa uang, melainkan bentuk lainnya seperti tanah, warung/took, bengkel, dan lain-lain. Laporan Susenas 2002 menunjukkan jenis-jenis aset yang dimiliki oleh rumah tangga miskin yang berada di daerah perkotaan dan pedesaan. Kepemilikan aset berupa tanah didaerah pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan didaerah perkotaan. Rata – rata persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset berupa tanah dipedesaan adalah 11,9% dari seluruh rumah tangaa yang tinggal di pedesaan. Sedangkan diperkotaan rata – ratanya sekitar 3,4%. Salah satu faktor penting dalam melakukan aktivitas produksi ekonomi adalah kepemilikan aset. Jenis aset yang paling sedikit dimiliki oleh rumah tangga miskin baik di pedesaan maupun perkotaan adalah bengkel.

Kuncoro (2004) jungan mengungkapkan bahwa didalam dimensi spasial ekonomi bidang sosial memiliki dua dampak yaitu :

a. Akses Terhadap Fasilitas Pendidikan

Sejalan dengan program wajib belajar 9tahun, informasi mengenai kemampuan masyarakat dalam mengakses fasilitas pendidikan difokuskan pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan tingkat pertama. Untuk melihat distribusi penyediaan fasilitas pendidikan dalam agregat kabupaten / kota, dihitung berdasarkan presentase desa / kelurahan

yang tidak memiliki fasilitas SD/MI dari total desa / kelurahan dikabupaten/kota, sedangkan SLTP dihitung berdasarkan presentase dari kecamatan yang tidak memiliki SLTP/MTs dari total kecamatan di kabupaten/kota tersebut.

b. Akses Terhadap Fasilitas Kesehatan

Untuk menggambarkan sebaran tingkat penyediaan pelayanan berupa fasilitas kesehatan, pendekatannya melalui informasi presentase desa/ kelurahan di kabupaten/ kota yang tidak memiliki fasilitas kesehatan.

6. Strategi/ Kebijakan Dalam Mengurangi Kemiskinan

a. Pembangunan Pertanian

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada 3 aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengurangan kemiskinan tersebut, terutama di daerah perdesaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan perdesaan dan pengurangan kemiskinan perdesaan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk pembangunan irigasi. Profitabilitas produksi padi telah meningkat sekitar dua per tiga (dalam ukuran rill) antara 1969 dan 1987 ketika varietas unggul menggantikan varietas tradisional.

Kontribusi utama lainnya datang dari program Pemerintah untuk meningkatkan produksi tanaman keras. Dan akhirnya, pembangunan luar Jawa juga berperan mengurangi kemiskinan di Jawa melalui pembangunan pertanian di daerah – daerah transmigrasi.

b. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. Perluasan ruang lingkup dan kualitas dari pelayanan – pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi modal insani yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin tersebut.

Di Indonesia atau dimana saja, pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Ada tiga faktor utama mendasari kebijakan ini. Pertama, berkurangnya beban penderitaan secara langsung memuaskan kebutuhan konsumsi pokok yang juga merupakan tujuan kebijaksanaan sosial yang sangat penting. Kedua, perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan kemiskinan: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energy. Dan ketiga, penurunan tingkat kematian bayi dan anak – anak secara tak langsung juga

berperan dalam mengurangi kemiskinan yakni menurunkan tingkat kesuburan: tingkat kematian yang semakin rendah tidak saja membantu para orang tua untuk mencapai jumlah keluarga yang mereka inginkan, tetapi juga membuat mereka menginginkan keluarga yang lebih kecil.

Pelayanan – pelayanan pokok seperti air bersih, tempat pembuangan sampah, perumahan dan lain – lainnya juga penting bagi golongan miskin. Tanpa kemajuan dalam perbaikan akses golongan miskin terhadap pelayanan – pelayanan pokok tersebut, efektivitas dari setiap pelayanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan diatas, bisa terganggu. Walaupun tujuan pokoknya sama, strategi dan prioritas pemerintah yang diperlukan berbeda antara daerah perdesaan dan perkotaan, karena perbedaan kebutuhan dan kerangka kelambagaan.

c. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM – LSM bisa memainkan peran yang lebih besar didalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang mereka bina, LSM-LSM ini untuk beberapa hal bisa menjangkau golongan miskin tersebut secara lebih efektif ketimbang program – program pemerintah. Lebih dari itu, keterlibatan aktif dari LSM – LSM tersebut di dalam program – program pemerintah cenderung untuk meningkatkan “penerimaan” masyarakat perdesaan terhadap program – program pemerintah dan oleh karena itu pada akhirnya akan meningkatkan

partisipasi masyarakat. Keterlibatan LSM-LSM juga dapat meringankan biaya finansial dan staf dalam pengimplementasian program padat karya untuk mengurangi kemiskinan.

Bentuk dan macam organisasi-organisasi kemasyarakatan bisa dikelompokkan kedalam 4 kategori :

- 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- 2) Lembaga Pembina Swadaya Masyarakat (LPSM)
- 3) Organisasi – organisasi lainnya, dan
- 4) Organisasi-organisasi Semi pemerintah

C. Pengangguran

Pengangguran adalah yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno,2004).

1. Definisi Pengangguran

Pengangguran (unemployment) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh Negara-negara sedang berkembang (developing countries). Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.

Pengangguran pada prinsipnya mengandung arti hilangnya output (*loss of output*) dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja (*human misery*), dan merupakan suatu bentuk pemborosan sumber daya ekonomi. Disamping

memperkecil output, pengangguran juga memacu pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan kompensasi pengangguran dan kesejahteraan. Hal ini terutama terjadi dinegara – Negara maju dimana Negara atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan tunjangan bagi para penganggur.

2. Jenis Pengangguran

Untuk mengelompokkan masing – masing pengangguran menurut Edgar O. Edwards (1974) dalam (Arsyid, 2004: 288) perlu diperhatikan dimensi – dimensi:

- a. Waktu (banyak diantara mereka yang bekerja ingin bekerja lebih lama, misalnya jam kerjanya perhari, perminggu, atau pertahun).
- b. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan)
- c. Produktivitas (kurangnya produktivitas sering kali disebabkan oleh kurangnya sumberdaya – sumberdaya komplementer untuk melakukan pekerjaan).

Walaupun hal – hal tersebut merupakan dimensi – dimensi yang paling jelas untuk efektifnya seseorang bekerja , factor – factor seperti motivasi, sikap, dan hambatan-hambatan budaya juga harus diperhatikan.

Berdasarkan hal-hal diatas Edwards membedakan 5 bentuk pengangguran yaitu :

- a. **Pengangguran terbuka** : baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja, karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan).
- b. **Setengah menganggur** (*underemployment*) : yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka bisa kerjakan.

c. Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh: yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur, termasuk disini adalah:

1) **Pengangguran tak kentara** (*disguised unemployment*) Misalnya para petani yang bekerja diladang selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh.

2) **Pengangguran tersembunyi** (*hidden unemployment*) misalnya orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.

3) **Pensiun lebih awal**, fenomena ini merupakan kenyataan yang terus berkembang dikalangan pegawai pemerintah. Dibeberapa Negara, usia pension dipermuda sebagai alat untuk menciptakan peluang bagi yang “muda-muda” untuk menduduki jabatan diatasnya.

d. **Tenaga kerja yang lemah** (*impaired*): yaitu mereka mungkin bekerja di full time, tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.

e. **Tenaga kerja yang tidak produktif** : yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif, tetapi karena sumberdaya-sumberdaya penolong kurang memadai maka mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik.

Dilihat dari sebab-sebab timbulnya, pengangguran dapat dibedakan kedalam beberapa jenis sebagai berikut :

a. Pengangguran friksional

Pengangguran friksional atau transisi (*frictional or transitional unemployment*) adalah jenis pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan didalam syarat-syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi.

Jenis pengangguran ini dapat pula terjadi karena berpindahnya orang – orang dari suatu daerah ke daerah lain, atau dari suatu daerah ke daerah lain, atau dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, atau melalui berbagai tingkat siklus kehidupan yang berbeda. Dengan perkataan lain, **pengangguran friksional** adalah pengangguran sebagai hasil dari pergerakan individual anatar bekerja dan mencari pekerjaan baru (Dornbusch, et.al, 2001) dalam (Nanga, 2005: 250)

b. Pengangguran structural

Adapun yang dimaksud dengan pengangguran structural (*structural unemployment*) adalah jenis pengangguran yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan didalam struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketidak seimbangan didalam pasar tenaga kerja yang terjadi antara lain karena adanya peningkatan permintaan atas satu jenis pekerjaan, sementara jenis pekerjaan lainnya permintaannya mengalami penurunan, dan penawaran itu sendiri tidak dapat melakukan penyesuaian dengan cepat terhadap situasi tersebut.

Singkatnya, **pengangguran structural** adalah pengangguran yang terjadi ketika perekonomian beroperasi pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*) atau tingkat alamiah (*natural rate*). Salah satu factor penyebab timbulnya pengangguran structural adalah karena adanya kemajuan teknologi (*technology progress*). Dengan kemajuan teknologi, di satu pihak memang memungkinkan perusahaan untuk menaikkan produksi, namun pada waktu

yang sama perusahaan juga akan mengurangi tenaga kerja yang digunakan. Pengangguran yang disebabkan oleh kemajuan teknologi inilah yang dinamakan **pengangguran teknologi** (*technological unemployment*) **Muara Nanga (2005: 250)**.

c. Pengangguran alamiah

Tingkat pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*) adalah tingkat pengangguran yang terjadi pada kesempatan kerja penuh, atau tingkat pengangguran dimana inflasi yang diharapkan (*expected inflation*) sama dengan tingkat inflasi actual (*actual inflation*). **Milton Friedman (1968)** dalam **Nanga (2005: 250-251)** mendefinisikan tingkat pengangguran alamiah sebagai tingkat pengangguran dimana tekanan keatas (*upward pressure*) dan tekanan ke bawah (*downward pressure*) terhadap inflasi harga dan upah berada dalam keseimbangan. Pada tingkat alamiah (*natural rate*), inflasinya adalah stabil, artinya tanpa kecenderungan untuk menampilkan percepatan ataupun penurunan inflasi.

Oleh karena itu, tingkat pengangguran alamiah juga sering didefinisikan sebagai tingkat yang tidak memacu inflasi. Pengangguran alamiah terdiri alamiah terdiri atas pengangguran friksional dan pengangguran struktural, dan para ahli ekonomi memperkirakannya berkisar antara 4,0 – 6,5 persen (Nanga, 2005:251).

d. Pengangguran siklis atau konjungtural

Pengangguran siklis atau konjungtural (*cylical unemployment*) adalah jenis pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari merosotnya kegiatan ekonomi

atau karena terlampau kecilnya permintaan agregat (*aggregate effective demand*) didalam perekonomian dibandingkan dengan penawaran agregat.

Oleh karena itulah, para ahli ekonomi sering menyebut jenis pengangguran ini sebagai "*demand-deficient unemployment*". Sebaliknya pengangguran siklus atau konjungtural akan berkurang kalau tingkat ekonomi meningkat. Singkatnya, pengangguran siklus adalah pengangguran diatas tingkat alamiah atau pengangguran yang terjadi ketika output berada dibawah tingkat kesempatan kerja penuh (Nanga, 2005:251).

3. Dampak Pengangguran

Pengangguran yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat membawa dampak atau akibat buruk, baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat.

a. Dampak Pengangguran terhadap Perekonomiam

Setiap Negara selalu berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakatnya dapat dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkelanjutan (*sustained economic growth*). Tingkat pengangguran yang relative tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk pengangguran terhadap perekonomian adalah :

Pertama, pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan output actual yang dicapai lebih rendah dari atau berada dibawah berada dibawah output potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang mungkin akan dicapainya.

Kedua, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak (*tax revenue*) pemerintah berkurang. Pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kegiatan ekonomi, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan pajak yang mungkin diperoleh pemerintah akan menjadi semakin sedikit. Dengan demikian, tingkat pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.

Ketiga, pengangguran yang tinggi akan menghambat, dalam arti tidak akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. *Pertama*, pengangguran tenaga kerja biasanya akan diikuti pula dengan oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Keadaan ini jelas tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di masa yang akan datang. *Kedua*, pengangguran yang timbul sebagai akibat dari kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah mengurangi keinginan perusahaan untuk melakukan investasi. Kedua hal tersebut jelas tidak akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

b. Dampak Pengangguran Terhadap Individu dan Masyarakat

Selain membawa akibat buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan, pengangguran yang terjadi juga akan membawa beberapa akibat buruk terhadap individu dan masyarakat, sebagai berikut :

Pertama, pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Di Negara – Negara berkembang tidak terdapat program asuransi pengangguran, dan karenanya kehidupan pengangguran dibiayai oleh tabungan masa lalu atau pinjaman/bantuan keluarga dan teman – teman. Keadaan ini potensial bisa mengakibatkan pertengakaran dan kehidupan yang tidak harmonis.

Kedua, pengangguran dapat menyebabkan kehilangan atau berkurangnya ketrampilan. Ketrampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila ketrampilan tersebut digunakan dalam praktek. Pengangguran dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan tingkat keterampilan (*skills*) pekerja menjadi merosot.

Ketiga, pengangguran dapat pula menimbulkan ketidak stabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Golongan yang berkuasa akan semakin tidak populer dimata masyarakat, dan berbagai tuntutan dan kritk akan dilontarkan kepada pemerintah dan adakalanya hal itu disertai pula dengan tindakan demonstrasi dan huru hara. Kegiatan-kegiatan criminal seperti pencurian dan perampokan, dan lain sebagainya akan semakin meningkat.

4. Hubungan Antara Pengangguran dan Kemiskinan

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan luasnya kemiskinan. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part-time*) selalu berada di antara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetepa disektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas.

Namun demikian, adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadang kala ada juga pekerja diperkotaan yang tidak bekerja secara suka rela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan –pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber – sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka (misalnya dari family, teman, tempat-tempat meminjam uang). Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyak individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang “mandiri” disektor informal, orang-orang seperti ini didefinisikan “bekerja secara penuh” tetapi toh mereka sering masih tetap miskin.

Disamping penjelasan di atas tentang hubungan antara pengangguran dan kemiskinan adalah masih tetap benar bahwa salah satu mekanisme pokok untuk mengurangi kemiskinan di Negara sedang berkembang adalah memberikan

upah yang memadai dan menyediakan kesempatan-kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat miskin. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja merupakan unsur yang paling esensial dalam setiap strategi pembangunan yang menitikberatkan kepada penghapusan.

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan dan merupakan sumber utama peningkatan standar hidup (*standard of living*) penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Dengan perkataan lain, kemampuan dari suatu Negara untuk meningkatkan standar hidup penduduknya adalah sangat tergantung dan ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya.

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan perkataan lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (GDP), atau pendapatan atau output perkapita (Arsyad, 2005:273).

Kuznetz dalam Jhingan (2004) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang – barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang di perlukannya.

Definisi ini memiliki tiga komponen : *Pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang. *Kedua*, teknologi maju merupakan factor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. *Ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideology sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Menurut Boediono (1985) dalam Kuncoro (2004: 129) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Di sini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoritikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoritikus tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, dan kebahagiaan, dengan rasa aman dan tenteram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 1999) dalam (Kuncoro, 2004: 129).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Terdapat beberapa teori yang mengungkapkan tentang konsep pertumbuhan ekonomi, secara umum teori tersebut sebagai berikut :

Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis, teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

Werner Sombart (1863-1974). Menurut Werner Sombart pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

a. Masa perekonomian tertutup

Pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen sehingga tidak terjadi pertukaran barang dan jasa.

b. Masa kerajinan dan pertukangan

Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif akibat perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa.

Pertukaran barang dan jasa pada masa ini belum didasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan, namun semata-mata untuk saling memenuhi kebutuhan.

c. Masa kapitalis

Pada masa ini muncul kaum pemilik modal (kapitalis). Dalam menjalankan usahanya kaum kapitalis memerlukan para pekerja (kaum buruh). Produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi sudah bertujuan mencari laba. Werner Sombart membagi masa kapitalis menjadi empat masa sebagai berikut :

Tingkat Prakapitalis, masa ini memiliki ciri beberapa ciri yaitu : (1) kehidupan masyarakat masih statis, (2) bersifat kekeluargaan, (3) bertumpu pada sektor pertanian, (4) bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri, (5) hidup secara berkelompok.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi

Faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat adalah:

a. Akumulasi Modal

Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik, dan sumberdaya manusia (*human resource*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang.

b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional dianggap sebagai factor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestic.

c. Kemajuan Teknologi

Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan factor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan – pekerjaan tradisional.

4. Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetap golongan masyarakat, termasuk digolongan penduduk miskin. Prastyo (2009:24), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negative antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

E. Definisi inflasi

Inflasi (*inflation*) adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Venieris dan Sebold (1978: 603) dalam Nangan (2005: 237) mendefinisikan inflasi sebagai suatu kecenderungan secara terus menerus sepanjang waktu. Berdasarkan definisi tersebut, kenaikan tingkat harga umum (*general prices level*) yang terjadi sekali waktu saja, tidaklah dapat dikatakan sebagai inflasi.

Dari definisi tersebut diatas, setidaknya ada tiga hal penting yang ditekankan yaitu :

- a. Adanya kecenderungan harga – harga untuk meningkat, yang berarti bisa saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan tendensi yang meningkat.

- b. Bahwa kenaikan tingkat harga tersebut berlangsung secara terus menerus (*sustained*), yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, akan tetapi bisa beberapa waktu lamanya.
- c. Bahwa tingkat harga yang dimaksud disini adalah tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang mengalami kenaikan itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi untuk harga barang secara umum.

1. Jenis Inflasi

Dilihat dari faktor – faktor penyebab timbulnya, inflasi dapat dibedakan kedalam tiga macam yaitu :

1. Inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat.
2. Inflasi dorongan biaya (*cost-push inflation*) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dengan dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi, yang menyebabkan perusahaan mengurangi supply.
3. Inflasi struktural, yaitu inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya berbagai kendala atau kelakuan struktural yang menyebabkan penawaran didalam perekonomian menjadi kurang atau tidak responsive terhadap permintaan yang meningkat.

2. Dampak Inflasi

Pertama, inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat, dan inilah yang disebut efek redistribusi dari inflasi. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil orang lainnya jatuh.

Kedua, inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena inflasi dapat mengalihkan sumberdaya dari investasi yang produktif ke investasi yang tidak produktif sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif.

Ketiga, inflasi juga dapat menyebabkan perubahan – perubahan di dalam output dan kesempatan kerja, dengan cara yang lebih langsung yaitu dengan memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan, dan juga memotivasi orang untuk bekerja lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini.

Kempat, inflasi dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil bagi keputusan ekonomi. Jika sekiranya konsumen memperkirakan bahwa tingkat inflasi dimasa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-besaran saat sekarang ketimbang mereka menunggu dimana harga sudah meningkat lagi.

3. Hubungan Inflasi terhadap kemiskinan

Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum, apabila harga-harga naik secara drastis dalam periode tertentu maka tingkat kemiskinan juga

akan naik. Tingkat kemiskinan naik bila masyarakat tingkat upahnya tetap, jika tingkat upahnya tetap sedangkan barang-barang naik, maka masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Hal itu terjadi karena, masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan hidup, karena terjadi inflasi yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran tersebut dapat di lihat bahwa pengangguran merupan salah factor yang mengurangi kesejahteraan masyarakat, jika suatu masyarakat ada yang sudah bekerja namun ada juga yang belum bekerja ini sama saja mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Inflasi adalah salah satu faktor penyebab kemiskinan karena inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus sepanjang waktu.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor pendukung untuk terciptanya pengentasan kemiskinan, jika suatu bangsa pertumbuhan ekonomi stabil dan pesat maka bangsa tersebut kesejahteraanya akan naik.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Tingkat pengangguran mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Probolinggo pada tahun 2004 - 2013.
2. Tingkat pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Probolinggo pada tahun 2004 - 2013.
3. Tingkat Inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2004 - 2013.